FIAI UII TAMBAH GURU BESAR

Makin Sulit Temukan Intelektual Publik

SLEMAN (KR) - Rektor UII Prof Fathul Wahid menyebutkan, saat ini, harus jujur diakui semakin sulit menemukan intelektual publik di Indonesia. Bahkan, membedakan antara intelektual publik yang berbicara dengan hati dan ketulusan, dengan selebritas akademik yang masih gandrung dengan sorot panggung dan glorifikasi.

KR-Fadmi Sustiwi

Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD menyerahkan SK Guru Besar kepada Prof Dr Tamyiz Mukharom disaksikan Koordinator Kopertais Kemenag Prof Dr Al-Makin.

Hal tersebut dikemukakan Rektor UII saat serahterima Surat Keputusan (SK) Guru Besar untuk Dr Tamyiz Mukharom MA di Gedung Sardjito UII di Jalan Kaliurang Km 14,5, Selasa (13/2). SK diserahkan Koordinator Kopertais Kemenag Prof Dr Al Makin kepada Rektor UII dan diteruskan kepada Prof Dr Tamyiz Mukharom MA.

Dikatakan Prof Fathul, menjadi intelektual juga soal konsistensi antara kata dan perbuatan, termasuk ketika jauh dan dekat dengan lingkaran kekuasaanm. "Rumus ini valid kita semua, termasuk saya. Tentu, bisa jadi sebagian dari kita ada yang langsung mengatakan dalam hati, 'tidak mudah'," ujarnya.

Mengutip pandangan Chomsky, Fathul menyebutkan, menjadi intelektual seperti yang tergambarkan tersebut bukan tanpa tantangan dan risiko. "Setiap dari kita bisa mengimajinasikannya masing-masing, mulai dari risiko yang terlihat abu-abu muda sampai yang gelap pekat," tambahnya.

Namun, fakta di lapangan memberikan cerita, tidak semua akademisi berani mengambil peran ini, karena beragam alasan. Selain potensi risiko di dalamnya, termasuk, kurangnya rasa percaya diri, ditambah dengan kegamangan terkait efektivitas gerakan, sehingga membuat banyak akademisi enggan terlibat dalam aktivisme. "Pembahasan soal ini dimuat dalam buku peringatan 50 tahun pemikiran Chomsky," katanya.

Sebelumnya Rektor UII mengungkapkan, setelah 16 tahun, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII baru melahirkan guru besar kedua. Jarak sangat panjang dengan SK professor pertama tahun 2017 silam disebut Rektor UII, bisa menghadirkan beragam diskusi. Mulai dari ketatnya proses yang harus diikuti, sulitnya mengajak para dosen meningkatkan kewenangan akademiknya atau justru sebuah kesabaran yang perlu dicontoh.

Bertambahnya seorang guru besar, menurutnya, proporsi dosen dengan jabatan akademik profesor mencapai 5,2% (41 dari 788 orang). Persentase ini hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional, yang baru 2,61% dari sekitar 311.000 dosen. **(Fsy)-f**

PEMBETULAN

DALAM berjudul 'UII Peringati Milad ke-81 Krisis Etika Level Elite, Tantangan SdGs' (KR, Selasa, 12/2) terdapat kekeliruan yang cukup mengganggu di alenia pertama. Kalimat yang benar adalah: "Negara-negara di dunia telah melampaui perjalanan panjang dalam merumuskan SDGs yang diharapkan tercapai pada 2030. Indonesia turut mengambil bagian dalam ikhtiar jangka panjang tersebut dengan menyusun peta jalan yang diharapkan mampu memberikan kemanfaatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Kesalahan itu terjadi akibat persoalan teknis. Demikian kesalahan dibetulkan. **(Red)**

UNTUK SISWA MADRASAH

Rp 900 M Beasiswa PIP 2024 Cair

JAKARTA (KR) - Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) 2024 bagi siswa madrasah segera cair. Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa madrasah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Hal tersebut ditegaskan Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani dalam Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Penyaluran Anggaran PIP 2024 secara online melalui zoom meeting, Selasa (13/2).

Tidak kurang 1.000 peserta ikut bergabung dalam rapat online ini. Rakor juga disiarkan melalui Youtube Channel Pendidikan Islam. M Ali Ramdhani menekankan, PIP merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mereka tetap bersekolah.

"Murid-murid madrasah harus bercita-cita setinggi mungkin. Janganlah keterbatasan ekonomi maupun lainnya menjadikan cita-cita mereka terhambat. Pupuk terus semangat untuk belajar. Jangan khawatir dengan biaya. Pemerintah Indonesia telah menfasilitasi kalian semua," ujar Ali Ramadhani memberikan motivasi kepada peserta zoom.

Ia meminta jangan ada siswa tak bisa melanjutkan pendidikan kesarjanaan yang bermutu hanya gara-gara keterbatasan ekonomi. Pemerintah menyediakan beasiswa bagi anak-anak Indonesia, salah satunya melalui Kemenag.

Direktur KSKK Madrasah M Sidik Sisdiyanto mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk PIP Madrasah sebesar Rp 1.302.009.650.000 (Satu triliun tiga ratus dua miliar sembilan juta lima puluh ribu rupiah). Jumlah ini terdiri Rp 422 miliar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Rp 558 miliar untuk siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 320 miliar untuk siswa Madrasah Aliyah (MA).

M Sidik Sisidiyanto menjelaskan, anggaran tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada minggu kedua Februari 2024, sebesar Rp 900 miliar.

Untuk proses penyaluran PIP, Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Madrasah diminta berkoordinasi dengan pihak bank penyalur. Sinergi bertujuan untuk memberikan asistensi dan juga akses yang mudah dan efisien kepada seluruh peserta didik terkait dengan pencairan anggaran PIP. **(Ati)-f**

Program KIP Kuliah Merdeka Resmi Dibuka

JAKARTA (KR) - Kemendikbudristek terus berkomitmen meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah dan tinggi untuk mempercepat pembangunan sumberdaya manusia unggul guna meningkatkan produktivitas, memajukan kebudayaan dan mencapai kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045. Wujud komitmen tersebut berfokus pada peningkatkan pembangunan SDM yang salah satunya dilakukan melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi atau yang umum disebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Merdeka.

Di tahun 2024, Kemendikbudristek, melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP/Puslapdik), kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa baru di seluruh Indonesia untuk menjadi penerima KIP Kuliah Merdeka sesuai jenjang studinya, baik sarjana maupun diploma. Hal tersebut terungkap pada webinar Sosialisasi Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka di Jakarta, Senin (12/2/).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puslapdik, Abdul Kahar mengatakan, Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,9 triliun di tahun 2024. Dana tersebut, digunakan untuk membiayai Program KIP Kuliah Merdeka dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa yang terdiri 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah baru dan sisanya adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah *on going* dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di 2024 akan mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi pada jalur UTBK-SNBT serta seleksi lain oleh perguruan tinggi bagi pelamar KIP Kuliah Merdeka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau menerima program bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.02/2023.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/SPP) yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi. Dana tersebut diberikan dalam 5 klaster besaran per bulan, yaitu Rp 800.000, Rp 950.000, Rp 1.100.000, Rp 1.250.000 dan Rp 1.400.000. Bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya merupakan hak mahasiswa yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk biaya tambahan apapun. **(Ati)-f**

EKONOMI

PASCAPENCABUTAN IZIN USAHA BPR UMKM SOLO

LPS Bayarkan Klaim Penjaminan Simpanan Nasabah

KR-Istimewa

Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap pertama BPR UMKM Solo.

SOLO (KR) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat membayar klaim simpanan tahap pertama nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Usaha Madani Karya Mulia (BPR UMKM) Solo Jateng, pada 13 Februari 2024. Kurang dari lima hari kerja, LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan tahap pertama Rp 18,68 miliar mencakup 1.000 rekening.

"Pascapencabutan izin usaha BPR UMKM Solo oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Bahkan, kurang dari seminggu setelah BPR UMKM ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama," ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto, saat memantau proses pembayaran klaim penjaminan nasabah BPR UMKM di Solo, Selasa (13/2).

Dimas menjelaskan, bagi para nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui bank pembayar yang ditunjuk LPS yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk di Jalan Slamet Riyadi 285 Sondakan Laweyan Kota Surakarta.

Dimas mengimbau kepada para nasabah BPR UMKM yang belum masuk dalam pembayaran tahap pertama ini, agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya.

"Proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha BPR UMKM. Namun, LPS optimis dan menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya kurang dari 90 hari kerja," kata Dimas.

Penting diketahui, lanjutnya, bagi para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar, agar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito. **(San)-f**

Satgas PASTI Blokir 233 Pinjol Ilegal

JAKARTA (KR) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI kembali melakukan pemblokiran terhadap 233 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri), yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Sejak 2017 hingga 31 Januari 2024, Satgas telah menghentikan 8.460 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

"Pada Januari 2024 Satgas PASTI kembali melakukan pemblokiran terhadap 233 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri), yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto di Jakarta, Selasa (13/2).

Dikatakan, Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Di awal 2024, Satgas PASTI juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan dengan modus lowongan kerja paruh waktu yang marak akhir-akhir ini. Kegiatan tersebut semakin banyak beredar di masyarakat dan merugikan para korbannya.

Dikatakan Hudiyanto, ada beberapa modusnya, aantara lain awalnya pelaku meminta korban melakukan suatu pekerjaan untuk like dan subscribe suatu postingan di sosial media.

Setelah melakukan misi pertama, korban mendapatkan penghasilan dan kemudian diundang untuk bergabung dalam suatu grup chat. Selanjutnya pelaku meminta korban untuk melakukan deposit dan mengerjakan misi-misi berikutnya.

Pelaku memberikan janji, setelah misi terpenuhi dan terselesaikan dengan baik, korban akan mendapatkan deposit kembali beserta reward yang dijanjikan.

Pada pekerjaan selanjutnya, pelaku kembali meminta menambah deposit dari para korban, namun setelah beberapa waktu kemudian pelaku kabur atau menghilang dengan membawa kabur uang korban.

Korban ditipu dengan iming-iming mendapatkan imbalan yang cepat didapatkan dari hasil kerja paruh waktu.

Masyarakat diharapkan mewaspadai modus tersebut maupun modus-modus penipuan lainnya. Pemberantasan terhadap aktivitas keuangan ilegal sangat membutuhkan dukungan dan peran serta dari masyarakat, berupa sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menerima tawaran dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pastikan selalu memperhatikan dua aspek penting yaitu Legal dan Logis (2L). Legal artinya memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin usaha yang tepat dari otoritas/lembaga yang mengawasi. Logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak. **(Lmg)-f**

PERKUAT EKOSISTEM HALAL UMKM

BSI Permudah Pembayaran Sertifikasi

JAKARTA (KR) - Bank Syariah Indonesia (BSI) mendukung UMKM naik kelas, salah satunya dengan mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal. Perseroan menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk memberikan literasi pentingnya sadar halal kepada para pelaku UMKM di BSI UMKM Center.

BSI dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2) menyatakan serius meningkatkan pengembangan islamic ecosystem salah satunya melalui sertifikasi halal, karena hal ini menjadi salah satu cara umkm naik kelas dengan upgrade kualitas mutu dan standar produk melalui sertifikasi halal.

Untuk memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal, BSI juga telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kolaborasi tersebut terkait layanan pembayaran sertifikasi halal melalui virtual account. Sehingga saat ini UMKM yang menjadi nasabah BSI dapat melakukan pembayaran sertifikasi halal dengan mudah. **(Ogi)-f**

KR - Istimewa

BSI permudah pembayaran sertifikasi halal UMKM